

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan isu kompleks yang telah menjadi salah satu persoalan mendasar dan menjadi pusat perhatian di berbagai negara manapun. Kemiskinan merupakan suatu indikator yang penting untuk dapat melihat keberhasilan pembangunan suatu negara, setiap negara akan selalu bekerja keras agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan adalah situasi Dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Adawiyah, 2020).

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan multidimensional yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, dan fenomena kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi secara semata, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial, budaya dan politik. Dan di dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu “*No Poverty*” atau mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Pengentasan penduduk miskin juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ada di Indonesia termasuk juga di pemerintah daerah, baik pada Tingkat Provinsi maupun Kota, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001. (Rachmatullah dkk., 2021).

Kemiskinan terjadi karena adanya beberapa faktor salah satunya adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia (IPM)

merupakan angka yang mengukur suatu pencapaian pembangunan seseorang berdasarkan beberapa faktor kualitas hidup mendasar yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang, karena ketika produktivitas rendah akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Palindangan & Bakar, 2021). Indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia juga memiliki beberapa indikator dalam perhitungan antara lain adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita (Nafi'ah, 2021).

Selain indeks pembangunan manusia (IPM), faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan dapat dilihat dari upah minimum regional dan Pengangguran. Upah minimum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat miskin, khususnya bagi para pekerja, yang mana Ketika semakin tinggi upah minimum akan meningkatkan pendapatan Masyarakat dan kesejahteraan (Marjit dkk., t.t.). Menurut adam smith dalam (Ningtias & Anwar, 2021) upah ditentukan oleh biaya hidup kerja, tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan dengan prinsip *division of labor*. Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan (Franita & Fuady, t.t.)

Indonesia sebagai negara yang berkembang masih menjadi tantangan serius dalam Upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang atau sekitar 9,57 persen dari total penduduk, meningkat 0,03 persen poin terhadap bulan Maret 2022 dan menurun 0,14 persen point terhadap September 2021. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun

kesenjangan kemiskinan antar wilayah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus (Badan Pusat Statistik, 2023).

Jawa Barat sebagai provinsi terpadat di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatasi pengentasan kemiskinan. Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki karakteristik unik dalam konteks kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Tingkat kemiskinan di wilayah ini masih menunjukkan angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Hal tersebut pastinya menjadi perhatian serius mengingat posisi strategis Kabupaten Cirebon sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Jawa Barat. Dikutip melalui bandung.bisnis.com pada tanggal 23 Agustus 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima daerah termiskin di Jawa Barat. Hal tersebut menjelaskan bahwasanya adanya ketimpangan yang signifikan dalam distribusi kesejahteraan di wilayah tersebut (Baihaqi, 2023)

Permasalahan kemiskinan selalu dihadapi oleh setiap negara di dunia baik itu negara berkembang maupun negara maju, setiap negara pernah mengalami bahkan ada yang sedang mengalami masalah kemiskinan, namun setiap negara memiliki Solusi yang berbeda dalam mengatasinya, hal tersebut pastinya tidak jauh berbeda dengan kemiskinan di berbagai wilayah di Jawa Barat khususnya pada Kabupaten Cirebon yang mana di setiap tahunnya angka kemiskinan mengalami perubahan yang berbeda tergantung dari bagaimana setiap daerah tersebut mengatasi lonjakan-lonjakan kemiskinan tersebut. Berikut data kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon

No	Tahun	Jumlah
1.	2013	307.200
2.	2014	300.500
3.	2015	313.210
4.	2016	288.490
5.	2017	279.600
6.	2018	232.400
7.	2019	217.640
8.	2020	247.940
9.	2021	271.020
10.	2022	266.100

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Data dan Informasi Kabupaten/Kota 2013-2022

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama periode 2013 hingga 2022, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada awal periode, tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,32% dan -2,18%. Namun, tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 4,23%, diikuti dengan penurunan tajam pada tahun 2016 sebesar -7,89% dan -3,08% pada tahun 2017. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2018 yang mencapai -16,88%. Setelah itu, meskipun sempat mengalami sedikit perbaikan, angka kemiskinan kembali naik tajam pada tahun 2020 sebesar 13,92% dan 9,30% pada 2021, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Memasuki tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menunjukkan tren penurunan sebesar -1,81%. Data ini menunjukkan dinamika perubahan kemiskinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan data diatas, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon dari tahun

ke tahun. Terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2015, peningkatan ini menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan Kembali meningkat pada periode tersebut. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2018 sampai 2019, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kebijakan atau program yang cukup efektif dalam mengurangi angka kemiskinan pada periode tersebut. Berdasarkan data diatas yang menunjukkan bahwa fluktuasi jumlah penduduk miskin ini dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih memerlukan perhatian yang lebih dan serius.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah indeks pembangunan manusia, upah minimum dan Tingkat pengangguran terbuka. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan angka yang mengukur suatu pencapaian pembangunan seseorang berdasarkan beberapa faktor kualitas hidup mendasar yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang, karena Ketika produktivitas rendah akan berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Palindangan & Bakar, 2021).

Tabel 1. 2
Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon

No	Tahun	Jumlah
1.	2013	65,06
2.	2014	65,53
3.	2015	66,07
4.	2016	66,70
5.	2017	67,39
6.	2018	68,05
7.	2019	68,69
8.	2020	68,75
9.	2021	69,12
10.	2022	70,06

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Data dan Informasi Kabupaten/Kota 2013-2022

Berdasarkan tabel 1.2, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, hal tersebut menjelaskan bahwa adanya perbaikan dalam kualitas hidup penduduk, yang mencakup aspek Kesehatan, Pendidikan, dan standar hidup yang layak. Selama periode yang tercatat dari tahun 2013-2022 tidak terdapat penurunan yang signifikan hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon berjalan relatif stabil dan mengalami perbaikan.

Tabel 1. 3
Upah Minimum Kabupaten Cirebon

No	Tahun	Jumlah
1.	2013	1.081.300
2.	2014	1.212.750
3.	2015	1.400.000
4.	2016	1.592.220
5.	2017	1.723.578
6.	2018	1.873.701
7.	2019	2.024.160
8.	2020	2.196.416
9.	2021	2.269.556
10.	2022	2.279.982

Sumber: Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Kabupaten di Jawa Barat 2013-2022

Berdasarkan tabel 1.3, Persentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Cirebon selama tahun 2013–2022 mengalami tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, kenaikan UMK tercatat sebesar 13,03% dan sedikit menurun menjadi 12,16% di tahun 2014. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 15,44%, kemudian mulai menurun kembali menjadi 13,73% pada 2016 dan 8,25% pada 2017. Fluktuasi kecil terjadi pada 2018 sebesar 8,71%, 2019 sebesar 8,03%, dan 2020 sebesar 8,51%. Namun, penurunan drastis terjadi pada tahun 2021 dan

2022, dengan kenaikan masing-masing hanya sebesar 3,33% dan 0,46%. Penurunan persentase ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan upah minimum di Kabupaten Cirebon cenderung melambat, yang bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang kurang stabil atau kebijakan penyesuaian upah yang lebih hati-hati dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon

No	Tahun	Jumlah
1.	2013	14,88
2.	2014	13,32
3.	2015	10,51
4.	2016	9,21
5.	2017	8,80
6.	2018	10,64
7.	2019	10,35
8.	2020	11,52
9.	2021	10,38
10.	2022	8,11

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Data dan Informasi Kabupaten/Kota 2013-2022

Berdasarkan tabel 1.3, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2013 hingga 2022 menunjukkan penurunan meskipun terdapat fluktuasi di beberapa tahun. Dari 2013 hingga 2017, TPT terus menurun dari 14,88% menjadi 8,8%, mencerminkan peningkatan ketersediaan lapangan kerja. Namun, pada 2018, angka pengangguran meningkat menjadi 10,64%, sebelum sedikit membaik menjadi 10,35% pada 2019. Dampak pandemi COVID-19 sangat terasa pada 2020, dengan lonjakan TPT meningkat ke 11,52%, yang menunjukkan banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pasca-pandemi, tingkat pengangguran mulai berangsur turun, dengan 10,38% pada 2021, dan mencapai 8,11% pada 2022, yang menjadi penurunan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Secara keseluruhan, meskipun mengalami kenaikan pada 2018 dan

2020, tren penurunan dalam jangka panjang menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan dan pemulihan ekonomi yang semakin stabil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran yang tinggi berpotensi meningkatkan kemiskinan karena masyarakat kehilangan sumber pendapatan. Di Kabupaten Cirebon, Tingkat pengangguran terbuka masih menunjukkan angka yang fluktuatif dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan berita yang bersumber dari bandung.bisnis.com bahwasanya selain kemiskinan, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon juga masih tinggi. Tercatat, sebanyak 90.118 (8,11) warga Kabupaten Cirebon dari total angkatan kerja 1.110.529 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Meskipun jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon memang masih tinggi, angka tersebut menurun dibandingkan periode 2021 yang mencapai 11,3 persen (Baihaqi, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga rata-rata kemiskinannya dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat adalah yang paling tinggi. Adanya usaha pemerintah yang belum merata dalam mengatasi masalah kemiskinan ke seluruh Kabupaten/Kota adalah penyebabnya, padahal dampak kemiskinan sangat berpengaruh besar dan buruk terhadap perekonomian. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Cirebon, sehingga bisa sebagai tolak ukur kebijakan dalam usaha mengatasi kemiskinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dkk., 2022a) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021, sedangkan Upah Minimum Regional (UMR) dan Tingkat

Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Sementara itu, secara simultan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2017-2021. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jati dkk., 2024a) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan pengangguran memiliki dampak positif. Selain itu, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus mendorong pembangunan manusia melalui akses pendidikan dan Kesehatan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk membuktikan dan menganalisis tentang indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2013-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dilihat bahwa kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dan penurunan dari 2013-2022, sehingga rata-rata kemiskinannya dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Barat adalah yang paling tinggi. Pembangunan manusia dan kesejahteraan Masyarakat adalah suatu isu yang kompleks yang memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama di wilayah

dengan tingkat kemiskinan yang signifikan seperti Kabupaten Cirebon. Sejak tahun 2013 hingga 2022, wilayah ini mengalami berbagai dinamika sosial ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara indeks pembangunan manusia, upah minimum dan kemiskinan menunjukkan bahwa kompleksitas tersendiri. Meskipun adanya peningkatan indeks pembangunan manusia dan upah minimum selama periode tersebut, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon belum menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, kesenjangan tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan mendalam tentang efektivitas kebijakan pembangunan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk memfokuskan penelitian dan menghindari meluasnya permasalahan serta tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah. Maka peneliti perlu membatasi permasalahan pada pembahasan pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum Kabupaten (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya dibatasi mengenai permasalahan makro ekonomi tentang kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon
2. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2013-2022
3. Upah Minimum Kabupaten Tahun 2013-2022
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2022

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022?
4. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum regional (UMR) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013-2022.
- b. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh upah minimum Kabupaten (UMK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013-2022.
- c. Untuk mengukur dan menganalisis Tingkat pengangguran terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2013-2022.
- d. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum kabupaten (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2013-2022.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini mampu memberikan pemahaman kemampuan akademis dan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), upah minimum Kabupaten (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan
- b. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya ilmu ekonomi. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan suatu Gambaran singkat dan secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah, dalam hal ini skripsi. Sistematika ini bertujuan untuk membantu pembaca agar dapat dengan mudah memahami isi dari suatu karya ilmiah. Masing-masing uraian akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas *grand theory*, landasan teori, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, kemiskinan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

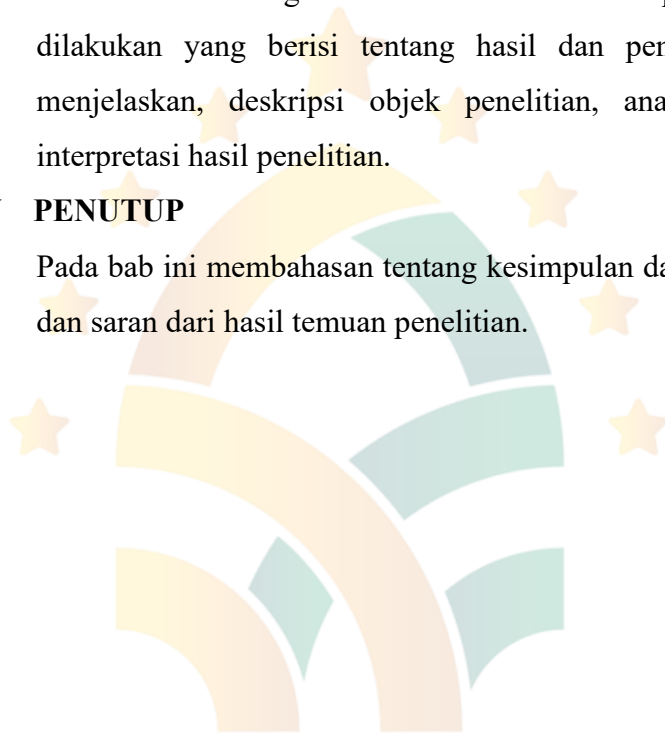
Pada bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode dan pendekatan penelitian, Populasi dan Sampel Teknik pengumpulan data, definisi operasional, dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan inti dari masalah penelitian yang dilakukan yang berisi tentang hasil dan pembahasan yang menjelaskan, deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran dari hasil temuan penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON